

# **PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI TETE MENUJU BONE KOTA WISATA BAHARI<sup>1</sup>**

ALFI SYAHRI

## **A. PENGANTAR**

Seperti yang kita ketahui Salah satu tujuan mendasar yang ingin dicapai negara berkembang seperti Indonesia saat ini adalah tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mantap. Usaha kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan pengembangannya agar dapat didayagunakan sebagai salah satu andalan kegiatan perekonomian nasional dan daerah. Penerimaan devisa dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata masih belum memenuhi target yang diharapkan, sehingga peran serta pemerintah, dunia usaha dan masyarakat masih harus terus di tuntut peran aktifnya. Berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu daerah akan memberikan pengaruh dan mendorong pembangunan sektor-sektor lain khususnya dalam hal menembus lapangan pekerjaan dan peluang untuk usaha. Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam sektor pariwisata hanya terbatas pada promosi pariwisata. Dengan demikian, pengelolaan objek wisata telah menjadi kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing. Wisata Bahari adalah suatu bentuk kegiatan wisata atau refreking yang berkaitan dengan air pantai, laut dan danau. Kegiatan ini misalnya saja seperti bermain SKY Air, Jet Sky, berenang, speed boat, menyelam dan kegiatan laun yang menikmati keindahan bawah laut. Indonesia bisa dikatakan mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkannya wisata bahari, karena merupakan negara kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah pesisir mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkannya wisata bahari.

Menurut Arief Yahya (2014), sektor wisata bahari merupakan salah satu sektor pariwisata yang patut dikembangkan secara berkelanjutan. Pengembangan sektor ini pun didukung dengan program pemerintah, sektor wisata bahari merupakan salah satu sektor wisata yang termasuk dalam program unggulan dan diprioritaskan dalam pembangunan kepariwisataan Hal ini dikarenakan, tren pariwisata bahari secara global terus mengalami peningkatan yang signifikan

---

<sup>1</sup> Artikel adalah tugas kelas WSBM 27 HAN Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2018

dalam tiga tahun terakhir ini. UU No. 10 Tahun 2009, Pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. World Tourism Organization (WTO), Pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Mathieson & Wall (1982), Pariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya, aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi tujuannya. Richard Sihite, Pariwisata ialah suatu bentuk kegiatan traveling atau perjalanan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek atau sementara waktu. James J. Spillane (1982), Pariwisata merupakan suatu kegiatan untuk melakukan perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan tujuan lainnya.

Robert McIntosh, Pariwisata merupakan gabungan dari interaksi antara pemerintah selaku tuan rumah pariwisata, bisnis, dan wisatawan. Guyer Flauler, Pariwisata merupakan suatu fenomena yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan & pergantian hawa, penilaian yang sadar & menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam, juga pada dasarnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan dari berbagai bangsa dan kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan. Koen Meyers (2009), Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya. Burkart & Medlik, Pariwisata ialah suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek menuju tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka tinggal dan bekerja. Herman V. Schular, Pariwisata merupakan sejumlah kegiatan terutama yang ada kaitannya dengan perekonomian secara langsung berhubungan dengan masuknya orang-orang asing melalui jalur lalu lintas di suatu negara, kota dan daerah tertentu. Sinaga (2010), Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata.

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.508 dan didukung oleh garis pantai kurang lebih 81.000 km. Garis pantai

yang panjang ini menunjukkan bahwa negara ini memiliki sumber daya pesisir potensial, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati. Diantara beberapa sumber daya hayati itu, seperti hutan mangrove, perikanan, terumbu karang, dan lain sebagainya, sedangkan sumber non hayati seperti mineral dan bahan tambang. Indonesia beruntung memiliki jutaan hektar hutan mangrove. Selain berfungsi ekologis sebagaimana hutan di daratan, mangrove memiliki keistimewaan lain karena posisinya yang berada di wilayah pencampuran antara daratan dan lautan. Dengan posisi demikian, jenis fauna dan flora yang dimilikinya menjadi sangat beragam karena merupakan perpaduan antara jenis yang terdapat di kedua wilayah tersebut. Hutan mangrove terdiri dari dua suku kata, yaitu hutan dan mangrove.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat (2) berbunyi "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan". Hutan mangrove adalah salah satu jenis hutan yang terletak di suatu daerah pasang surut seperti laguna, muara sungai, dan sepanjang pantai yang tergenang saat air pasang dan bebas dari genangan air saat surut serta tumbuhannya mampu beradaptasi dengan air laut (payau). Istilah mangrove berasal dari kombinasi dua bahasa yaitu Portugis (mangue) dan Inggris (grove). Dalam bahasa Inggris, istilah mangrove digunakan untuk menjelaskan komunitas tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut atau individu yang menyusun kelompok tumbuhan tersebut. Selain dikenal dengan istilah hutan mangrove, hutan yang terletak di area pasang surut air juga dikenal dengan sebutan hutan payau dan hutan bakau oleh masyarakat Asia Tenggara terutama oleh masyarakat Indonesia. (1) Bagaimana cara mewujudkan hutan mangrove sebagai tempat wisata bahari ?. (2) Bagaimana cara agar tempat wisata bahari ini dapat meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat setempat ?.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

**(B.1)** Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan, seperti termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terlihat bahwa intinya berada pada integrasi tiga pilar konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi ekonomi, ekologi dan sosial sehingga

memberikan jaminan akan keberadaan mangrove untuk dinikmati bagi semua generasi di bumi. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (2013) mengungkapkan bahwa lebih dari 50% hutan mangrove Indonesia dalam keadaan rusak dan ini menyebabkan merosotnya biodiversitas dan jasa lingkungan ekosistem mangrove akibat perubahan fungsi lahan sehingga meningkatkan risiko bencana. **(B.2)** Pengelolaan hutan mangrove di Indonesia saat ini diarahkan kepada rehabilitasi karena banyaknya kawasan yang rusak sehingga jika kegiatan tersebut berhasil, diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologisnya untuk menyediakan jasa lingkungan bagi masyarakat sekitarnya dan bagi masyarakat yang berada di luar kawasan tersebut. Namun, kegiatan rehabilitasi tersebut tidak bisa mengabaikan isu-isu ekonomi dan sosial terkait kehadiran masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya kelautan berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan di Indonesia, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal di Indonesia memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya, sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya. Berangkat dari asumsi bahwa laut tidak semata merupakan sebuah sistem ekologi, tetapi juga sistem sosial. Karena itu, pengembangan kelautan dengan memperhatikan sistem ekologi-sosial mereka yang khas menjadi penting. **(B.3)** Kuatnya institusi lokal di pesisir merupakan pilar bangsa bahari. Bila mereka berdaya, aturan lokal mereka bisa melengkapi kekuatan hukum formal. Mereka bisa menjadi pengawas laut yang efektif, menjadi pengelola perikanan lokal karena didukung pengetahuan lokal (traditional ecological knowledge), serta pendorong tumbuhnya ekonomi pesisir. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan mangrove sangat penting karena dapat menjadi faktor sukses dari pengelolaan itu sendiri, sebagaimana terbukti pada beberapa kegiatan rehabilitasi mangrove di daerah Sinjai, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pelibatan masyarakat juga dilakukan di banyak negara, seperti Vietnam dan Bangladesh. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove merupakan langkah strategis dan tepat, selain karena pertimbangan di atas, juga mengingat begitu banyak dan luas pulau-pulau kecil di Indonesia yang sulit diawasi oleh aparat, karena ketebatasan personil dan peralatan. Selain itu, dengan modal pengembangan pengelolaan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti perlindungan sumber daya laut yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. **(B.4)** pengelolaan pariwisata bahari, pemerintah harus

mengubah dari pendekatan dari sistem birokrasi yang berbelit menjadi sistem pendekatan entrepreneurial. Dimana pemerintah dituntut untuk tanggap dan selalu bekerja keras dalam melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus menyiapkan sebuah regulasi/kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata bahari. Kebijakan tersebut antara lain, menciptakan kawasan ekonomi khusus di kawasan yang sedang mengembangkan pariwisata bahari, misalnya memberikan kebijakan bebas visa pada wisatawan yang akan berkunjung dll.

### **C. PEMBAHASAN**

Pantai masih menjadi tujuan wisata favorite masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat yang tinggal di perkotaan. Salah satu pantai terindah di kabupaten Bone adalah Pantai Tete. Terletak sekitar 55 kilometer sebelah selatan kota Watampone tepatnya di Desa Bone Puteh, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, sekitar 175 kilometer dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai Tete dikenal karena pesona hamparan pasir putih sepanjang pantainya, berada di kaki Gunung Meru yang menjulang. Eksotisme Pantai Tete semakin mempesona dengan sebuah pulau kecil berbentuk gunung (Bulu Betta) tidak jauh dari bibir pantai. Pengunjung dapat berjalan kaki ke pulau tersebut saat air pasang sedang surut, melewati hamparan pasir putih yang terbentuk akibat pertemuan gelombang berlawanan arah.

Pantai Tete berjarak Posisi Pantai Tete ke arah selatan menuju Kota Sinjai, Lokasi ini lebih dekat dari pusat Kota Sinjai dibandingkan dari pusat Kota Watampone. Selain digunakan sebagai tempat wisata dan rekreasi, Pantai Tete juga digunakan sebagai pusat pelatihan dan pembinaan fisik bagi para anggota baru TNI. Jadi jangan heran jika anda berkunjung ke sana, anda tidak hanya mendapati fasilitas wisata, tapi juga barak-barak tempat menginap bagi para prajurit baru selama masa pelatihan. Sebenarnya Pantai Tete merupakan salah satu sumber pemasukan daerah Pemerintah Kabupaten Bone, sayangnya tempat ini tidak dikelola dengan baik, bahkan terkesan ditelantarkan. Saat ini perjalanan menuju ke Pantai Tete sudah lancar menggunakan mobil atau motor disebabkan kondisi jalan yang sudah bagus dan beraspal. Hal ini berbeda dengan kondisi jalan beberapa tahun lalu yang masih rusak.

Jika kita amati secara analistis pantai Tete sama sekali tidak memiliki pohon atau hutan mangrove, lambat laun tanpa kita sadari abrasi adalah ancaman yang sangat serius bagi daerah pesisir mengapa saya katakan demikian sebab

hilangnya area pesisir dapat menurunkan eksistensi pesona wisata bahari pantai Tete. Apakah pentingnya Mangrove?. Hutan mangrove dapat melindungi tambak perairan ikan dan ekosistem laut yang dikelola oleh masyarakat. Melindungi dari resiko bencana rob, abrasi, bahkan tsunami. Abrasi mengakibatkan banyak masalah seperti hilangnya lahan permukiman, tambak dan bahkan mata pencaharian utama penduduk tersebut yang nanti berimbas pada tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Warga atau para nelayan yang ada di kawasan pesisir, bisa mencicil kehidupannya atau menyokong kebutuhan hidupnya dengan membuat industri kecil gula dari kayu bakar mangrove. Selain bisa memproduksi kayu, mangrove juga menciptakan lapangan kerja untuk penambak udang dan kepiting. Mangrove memiliki perakaran kokoh sehingga dapat meredam gelombang dan menahan sedimen, yang artinya dapat bertindak sebagai pembentuk lahan (lahan cruiser). Batang mangrove dapat melindungi permukiman, bangunan dan pertanian dari angin kencang atau intrusi air laut. Adapun strategi yang dapat kita lakukan untuk pengembangan daerah wisata tersebut adalah : Strategi Pengembangan desa pesisir setidaknya harus mampu mengakomodasi tiga hal pokok yaitu mitigasi bencana, pengembangan perekonomian pesisir, dan perlindungan ekosistem. Berikut beberapa rekomendasi strategi pengelolaan hutan Mangrove. Hutan mangrove digunakan sebagai benteng alami untuk mengurangi dampak abrasi dan hal itu juga masih belum dapat optimal. Maka dapat direncanakan pembuatan Buffer Zone sebagai rencana penghalang bencana. Pohon Mangrove juga dapat diolah menjadi bahan produksi yang dapat dijual seperti bahan makanan, snack, minuman, atau kerajinan.

Dilakukan pelatihan kepada masyarakat dalam pengolahan kayu Mangrove menjadi barang – barang bernilai jual tinggi sehingga masyarakat dapat menjamin perekonomiannya secara mandiri. Selain itu, hutan Mangrove dapat juga dikembangkan sebagai lokasi wisata, dengan menyediakan perahu / boot yang akan menarik biaya untuk tiap tarikannya. Strategi pengembangan dan pemanfaatan hutan Mangrove dapat berjalan optimal seiring dengan adanya pengelolaan yang baik oleh masyarakat setempat dan juga dukungan dari pemerintah daerah. Namun potensi yang di miliki tersebut saat ini belum sepenuhnya menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage) bangsa Indonesia yang dapat memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Oleh karena itu agar pariwisata bahari benar-benar menjadi salah satu penopang perekonomian negara secara berkelanjutan (an economically sustainable area/ecosytem), maka pariwisata bahari harus di bangun dengan strategi yang terencana dan bervisi jangka panjang.

Strategi pertama, dalam pengelolaan pariwisata bahari tersebut pemerintah harus mengubah dari pendekatan dari sistem birokrasi yang berbelit menjadi sistem pendekatan entrepreneurial. Dimana pemerintah dituntut untuk tanggap dan selalu bekerja keras dalam melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus menyiapkan sebuah regulasi/kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata bahari. Kebijakan tersebut antara lain, menciptakan kawasan ekonomi khusus di kawasan yang sedang mengembangkan pariwisata bahari, misalnya memberikan kebijakan bebas visa pada wisatawan yang akan berkunjung dll.

Kedua, melakukan pemetaan terhadap potensi pariwisata bahari yang dimiliki, yaitu berupa nilai, karakteristiknya, infrastruktur pendukungnya, dan kemampuannya dalam menopang perekonomian. Dengan demikian dapat ditentukan pariwisata bahari mana yang harus segera dibangun dan mana yang hanya perlu direvitalisasi. Selain itu kita juga perlu memetakan lingkungan yang terkait dengan pariwisata bahari baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internalnya yang perlu dipetakan adalah sejauh mana kekuatan dan kelemahan (strength and weakness) pariwisata bahari tersebut. Sedangkan Lingkungan eksternal yang perlu dipetakan adalah sosial-budaya, politik/kebijakan, ekonomi-pasar, dan kemampuan teknologi. Selain itu juga perlu di ketahui sejauh mana negara-negara lain melangkah dalam pengembangan pariwisata bahari, sehingga kita bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka dalam mengembangkan pariwisata bahari. Ketiga, Menyusun rencana investasi dan pembangunan atas berbagai informasi yang telah kita dapatkan dari pemetaan diatas. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ini adalah, bahwa kita tidak hanya akan membangun sebuah pariwisata bahari saja Namun juga perlu di perhatikan faktor pendukungnya seperti akses transportasi, telekomunikasi dll. Dengan demikian rencana pengembangan pariwisata bahari dapat terukur dan tetap sasaran.

Keempat, menciptakan kualitas SDM yang tangguh di bidang pariwisata bahari, baik skill-nya, kemampuan dalam inovasi, adaptabilitas dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan eksternal, budaya kerja dan tingkat pendidikan serta tingkat pemahaman terhadap permasalahan strategis dan konsep yang akan dilaksanakannya. Karena di masa mendatang keunggulan SDM dalam berinovasi akan sangat penting setara dengan pentingnya SDA dan permodalan. Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi yang pesat, khususnya teknologi informasi. Kelima, melakukan strategi pemasaran yang baik, seperti yang dilakukan negara tetangga kita Thailand yang memasarkan objek wisatannya di televisi-televisi internasional dan berbagai media seperti internet, majalah dan pameran-pameran

pariwisata di tingkat internasional. Bahkan mereka menghabiskan dana sekitar US\$ 1 miliar untuk mempromosikan wisata mereka di beberapa jaringan televisi internasional. Bahkan saking kreatifnya, beberapa negara melakukan segmentasi pasar wisatawan, ini seperti yang dilakukan Hong Kong dan Thailand untuk memudahkan merencanakan pengembangan pariwisatanya dengan tidak menyamaratakan pasar wisatawannya.

Kelima strategi ini kirannya dapat membantu bangsa ini dalam rangka memaksimalkan peran pariwisata bahari. Namun tetap saja, strategi-strategi ini tidak akan berarti jika pemerintah, investor/swasta, perbankan, dan masyarakat tidak bersatu-padu dalam membangun pariwisata bahari untuk kemakmuran rakyat.

#### **D. PENUTUP**

Telah kita ketahui bahwa potensi wisata bahari kita sangat beragam dan nilai keindahanya tiada bandingannya di dunia. Pemeliharaan atau perlindungan kawasan wisata bahari secara berkesinambungan yang melibatkan partisipasi masyarakat (Human system) di sekitar kawasan, tidak akan berhasil berjalan dengan baik bila tidak diimbangi dengan upaya yang maksimal. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengembangkan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan ekosistem ini, serta memperoleh manfaat dari keterlibatan tersebut. Disisi lain, secara ekonomis melibatkan masyarakat dalam sistem pengelolaan dan pengawasan ini juga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik itu masyarakat di sekitar kawasan Mangrove yang umumnya relatif miskin dan juga pemerintah yang bertindak sebagai institusi pengelola. Dengan demikian strategi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan ekosistem mangrove ini selain mencapai tujuan konservasi hutan Mangrove juga harus mampu mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Strategi ini tidak semata-mata hanya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan Mangrove serta kemampuan dalam mengelolanya, namun juga memberdayakan kehidupan sosial ekonomi mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pada akhirnya akan sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang biasa terjadi pada masyarakat pesisir.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Dahuri Rokhmin. 2008. Strategi Pengembangan Wisata Bahari. April 2008.



Dalam <https://rokhmindahuri.wordpress.com>

- Afriyani Yunaifah Ade, SE. 2010. Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Dalam [www.bppp-tegal.com](http://www.bppp-tegal.com) artikel konservas

- Yanti Sri. 2017. Penelitian Pengembangan Pariwisata Pantai Tete di Kabupaten Bone untuk Meningkatkan PAD. Desember 2017.

Dalam [sriyanti1905.blogspot.com](http://sriyanti1905.blogspot.com) 2017/12 p...